

Efektivitas Pelaksanaan Silayda E-KTP

Ary Ananda Pane

Anandaary020@gmail.com

Adi Syahputra Sirait

Adisyahputra.sirait@iain-padangsidimpuan.ac.id

Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum

ABSTRACT

The Effectiveness of the Implementation of SILAYDA (Online Service System) at the Department of Population and Civil Registry of Padangsidimpuan City which is reviewed in the Regulation of the Minister of Home Affairs of the Republic of Indonesia No. 7 of 2019 concerning Online Population Administration Services. The problem that occurs is to find out whether the implementation of the SILAYDA (Online Service System) at the Padangsidimpuan City Population and Civil Registry Service makes it easier for the community to manage ID cards or vice versa at the Padangsidimpuan City Population and Civil Registry Office. The formulation of the problem of this research is the problems that occur are to find out how the effectiveness of the implementation of SILAYDA (Online Service System) EKTP at the Population and Civil Registration Office of Padangsidimpuan City and to find out what are the obstacles in the implementation of the implementation of SILAYDA (Online Service System) E -KTP at the Population and Civil Registry Office of Padangsidimpuan City. The type of research that the author uses is field research which takes place at the Department of Population and Civil Registry of Padangsidimpuan City. Meanwhile, to manage and analyze the data is done by identification, category, analysis, and conclusion. The results obtained from this study indicate that in the Implementation of the SILAYDA (Online Service System) EKTP at the Population and Civil Registry Office of Padangsidimpuan City which is reviewed in the Regulation of the Minister of Home Affairs of the Republic of Indonesia No. 7 of 2019 concerning Online Population Administration Services, greatly facilitates the people of Padangsidimpuan City in managing ID cards at the Padangsidimpuan City Population and Civil Registry Office

Kata Kunci : Efektivitas, Silayda, e-KTP.

A. Pendahuluan

Semua yang ada di muka bumi adalah milik Allah SWT, menurut ajaran Islam bahwa Allah SWT adalah pemilik yang sesungguhnya dan mutlak atas alam semesta.¹Dengan memanfaatkan internet, maka akan muncul sangat banyak pengembangan layanan dari pemerintah kepada masyarakat yang memungkinkan peran aktif masyarakat dimana diharapkan masyarakat dapat secara mandiri melakukan seperti pelayanan publik dimana semua dengan bantuan teknologi *internet* akan dapat dilakukan dari mana dan kapan saja.

Sistem *online* ini untuk menyelenggarakan pelayanan publik yang lebih baik, meningkatkan hubungan antara pemerintah dengan masyarakat atau pun memberdayakan masyarakat melalui akses terhadap informasi, serta

meningkatkan efisiensi terhadap pemerintahan.Keuntungan dari sistem *online* ini diantaranya yaitu meningkatkan transparansi, meningkatkan kenyamanan, atau dapat mengurangi waktu dan biaya.Maka dari itu sistem *online* ini sudah diberlakukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padangsidempuan.

Sebelum adanya sistem pelayanan *daring*, masyarakat harus mendatangi kantor tempat pelayanan dan setelah mengikuti prosedur untuk mendapatkan E-KTP masyarakat membutuhkan waktu pembuatan kurang lebih selama 14 hari (2 minggu).Dikarenakan sistem yang diterapkan oleh pemerintah dirasa kurang relevan untuk melayani masyarakat, maka dibuatlah inovasi dan pembaharuan dalam sistem pelayanan publik. Sebagaimana yang terdapat dalam peraturan Kementrian Dalam Negeri (permendagri) Nomor 7 Tahun 2019 tentang pelayanan administrasi kependudukan secara *Daring*.

¹Ahmad Sainul, *Konsep Hak Milik Dalam Islam*, Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarahan Dan Keperdataan, Vol. 6, No. 2 (2020), hlm. 198.

Seiring dengan perkembangannya maka pelayanan e-KTP pun bertransformasi pada pelayanan secara *online*, Sistem ini yang hanya membutuhkan waktu 5 menit setelah mendaftar secara online melalui Link pendaftaran yang sudah disediakan oleh pihak pelayanan e-KTP.

Prinsip meneguhkan sikap adil digolongkan kepada suatu kewajiban bagi manusia, hal ini disebabkan bahwa adanya keadilan segala aktivitas masyarakat akan damai, bersatu sinkron serta menenggang antara satu dan lainnya.² Disdukcapil Kota Padangsidimpuan sudah merilis suatu inovasi yang bernama SILAYDA (Sistem Layanan Daring) yang di khususkan untuk permohonan cetak e-KTP agar masyarakat tidak datang berkerumun ke Disdukcapil dilakukan atas dasar sukarela tanpa megandung unsur

² Umi Kalsum Hasibuan, *Keadilan Dalam Al-Qur'an (Interpretasi Ma'na Cum Maghza Terhadap Q.S Al-Qur'an Al-Hujurat 49: 9)*, Al-Fawatih: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Hadis, Vol. 1, No. 2 (2020), hlm. 3.

paksaan.³ pelayanan ini masyarakat hanya datang untuk mengambil e-KTP yang sudah selesai di cetak hanya waktu 5 menit tutur dari Anisah Siregar. S.sos selaku (Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padangsidimpuan.

B. Metode Penelitian

Jenis Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya. Penelitian lapangan ini pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realistis tentang apa yang sedang terjadi di tengah-tengah masyarakat.⁴ Dalam kaitan penelitian, ingin menggambarkan dan melakukan analisis dengan apa adanya tentang pelaksanaan Silayda (Sistem Layanan Daring) e-KTP di Dinas kependuduk dan

³Adanan Murroh Nasution, *Batas Mengambil Keuntungan Menurut Hukum Islam*, El-Qanuniy : Jurnal Ilmu Kesyarahan Dan Pranata Sosial, Vol. 4, No. 1 (2018), hlm. 88.

⁴Sawaluddin Siregar, *Perpektif Hukum Islam Mengenai Mekanisme Manipulasi Pasar Dalam Transaksi Saham Dipasar Modal*, Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi, Vol. 3, No. 2 (2017), hlm. 70.

Catatan Sipil Kota Padangsidimpuan. Informan yang diwawancarai adalah Sekretaris Disduk Capil, Seksi Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi dan Komunikasi, dan Masyarakat. Teknik Pengumpulan data yang digunakan Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Sumber data yang didapat dari data primer yaitu informasi dan data pelaksanaan SILAYDA (Sistem Layanan Daring)e-ktp di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padangsidimpuan dan data sekunder yaitu, Dalam penelitian ini adalah literatur yang dapat mendukung dalam menjawab rumusan masalah.

C. Pembahasan & Hasil Penelitian

Kurniawan menjelaskan jika efektivitas merupakan kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) dari pada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya. Pengertian

tersebut mengartikan bahwa efektivitas merupakan tahap dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai.⁵

E-KTP yaitu identitas resmi sebagai penduduk sebagai bukti kependudukan yang menggunakan NIK berskala nasional untuk seluruh lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan Nomor Induk Kependudukan atau NIK adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.

Sedangkan rekaman elektronik adalah alat penyimpan data elektronik yang dapat dibaca secara elektronik dengan alat pembaca dan berguna sebagai pengamanan data. E-KTP merupakan KTP nasional yang diatur didalam UU No. 23 Tahun 2006 yang mana

⁵M. Richard, *Efektivitas Organisasi*, (Jakarta: Erlangga, 1985), hlm. 40.

tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden No. 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan KTP yang berbasi No Induk Kependudukan atatu yang disinigkat sebagai NIK secara nasioanl, dan Peraturan Presiden No. 35 Tahun 2010 TentangPerubahan Peraturan Presiden No. 26 Tahun 2009. Dengan demikian peraturan tersebut maka E-KTPberlaku secara nasional atau didalam lingkup seluru Waraga Negara Indonesia.Dan dengan adanya perubahan KTP menjadi E-KTPdapat mempermudah masyarakat dalam bentuk pelayanan baik dari lembaga pemerintah daerah/pusat maupun swasta, karena tidak lagi memerlukan KTP setempat.Hukum Islam sebagai hukum ilahi bersifat abadi dan menjiwai semua permasalahan yang baru sesuai tuntutan ruang dan waktu, membuat aksereratif perkembangan hukum Islam.⁶

⁶Hendra gunawan, *Eksistensi Hukum Islam Di Indonesian Dalam Pembangunan Nasional*, Yurisprudentia:

Sedangkan manfaat atau fungsi dari adanya E-KTPbagi masyarakat, bangsa dan negara diantaranya, yaitu:Sebagai identitas jati diri, Berlaku nasional, sehingga tidak perlu lagi membuat KTP lokal untuk pengurusan izin, pembukaan rekening Bank, dan lain sebagainya, Mencegah KTP ganda dan pemalsuan KTP, Terciptanya keakuratan data penduduk untuk mendukung program pembangunan, E-KTP elektronik adalah dokumen kependudukan yang memuat sistem keamanan/pengendalian baik dari sisi administrasi ataupun teknologi informasi dengan berbasis pada basis data kependudukan nasional. E-KTPmerupakan program resmi pemerintah, oleh sebab itu dalam pelaksanaan E-KTP mempunyai Dasar hukum sebagai berikut :

Undang –Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dijelaskan bahwa: "penduduk hanya diperbolehkan

memiliki 1 (satu) KTP yang tercantum Nomor Induk Kependudukan (NIK). NIK merupakan identitas tunggal setiap penduduk dan berlaku seumur hidup". Dan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP berbasis Nomor Induk Kependudukan, yang berbunyi:KTP berbasis NIK memuat kode keamanan dan rekaman elektronik sebagai alat verifikasi dan validasi data jati diri penduduk, Rekaman elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi biodata, tanda tangan, pas foto, dan sidik jari tangan penduduk yang bersangkutan, Rekaman seluruh sidik jari tangan penduduk disimpan dalam basis data kependudukan, Pengambilan seluruh sidik jari tangan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan pada saat pengajuan permohonan KTP berbasis NIK, dengan ketentuan : Untuk WNI, dilakukan di kecamatan; dan untuk orang asing yang memiliki izin tinggal tetap dilakukan di instansi pelaksana, Rekaman sidik jari

tangan penduduk yang dimuat dalam KTP berbasis NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi sidik jari telunjuk tangan kiri dan jari telunjuk tangan kanan penduduk yang bersangkutan, Rekaman seluruh sidikjari tangan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perekaman sidik jari diatur oleh Peraturan Menteri.

Untuk menciptakan E-KTPdengan sembilan layer, tahap pembuatannya cukup banyak, diantaranya: *Hole punching*, yaitu melubangi kartu sebagai tempat meletakkan *chip*. *Pick and pressure*, yaitu menempatkan chip di kartu. *Implanter*, yaitu pemasangan antenna (pola melingkar berulang menyerupai spiral). *Printing*,yaitu pencetakan kartu. *Spot welding*, yaitu pengepresan kartu dengan aliran listrik.

Berdasarkan hasil temuan maka penulis menemukan bahwa

Sistem layanan daring (Silayda) berjalan efektif sebagaimana teori yang penulis anggap relevan untuk menganalisa data yang telah penulis dapatkan adalah teori utility oleh Jeremy bentham. Dalam pemikirannya, Bentham berpandangan bahwa kegunaan (utilitas) sebagai segala keuntungan, manfaat untuk mencegah rasa kepuasan ataupun ketidakbahagiaan. Hak mendapat keadilan dalam islam, merupakan suatu hak yang sangat penting untuk didapatkan setiap ummat islam sebagai Anugrah dari Allah SWT.⁷ Bentham mengemukakan bahwa sebuah sistem haruslah beradaptasi terhadap lingkungan dalam artian sebuah sistem dibentuk dan diterapkan harus melihat situasi dan keadaan di lingkungan sistem tersebut di terapkan, menyesuaikan akan kebutuhan yang dibutuhkan dalam lingkungan tersebut.

⁷ Syafri Gunawan, *Historis Kajian Hak Azasi Manusia Di Dalam Hukum Islam*, Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Pranata Sosial, Vol. 6, No. 2 (2020), hlm. 175.

Konsep yang pertama adalah Hedonisme kuantitatif, yang mana sebuah sistem haruslah beradaptasi terkait lingkungannya. Menelaah lebih jauh akan kebutuhan atau kesenangan lingkungan sistem tersebut, sehingga sistem yang diterapkan dapat diterima oleh masyarakat.

Hal tersebut dikemukakan oleh sekretaris Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Ibu Annisah Siregar, yang mana beliau mengatakan bahwa dengan diberlakukannya SILAYDA sebagai pengganti sistem yang lama atau sistem manual dikarenakan sistem yang lama dirasa kurang optimal dalam pembuatan KTP baru. Lebih lanjut lagi bu Annisah mengatakan bahwa SILAYDA diterapkan guna untuk mempermudah masyarakat dalam proses pembuatan ktp baru di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padangsidimpuan. Segala bentuk perubahan sistem yang diterapkan pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil semata-mata untuk mempermudah masyarakat,

Kemudian sebuah sistem Silayda ini diterapkan memiliki tujuan yang ingin dicapai yaitu untuk mempermudah masyarakat.

Sedangkan lebih lanjut Summun bonum atau tujuan keberhasilan sebuah sistem haruslah menelaah pada upaya menetapkan prioritas tujuan yang ingin dicapai serta memobilisasi komponen yang ada pada sistem tersebut agar berfungsi sebagaimana mestinya. Dalam sistem di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padangsidempuan, diberlakukannya SILYDA untuk menjawab permasalahan terkait tingkat efektivitas dan efisiensi pembuatan ktp baru dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi, diterbitkanlah basis daring SILAYDA dengan tujuan pengoptimalan perihal efektivitas pelaksanaan Silayda e-KTP.

Dapat dikatakan bahwa target pencapaian tujuan disinilah tingkat efektivitas pelaksanaan SILAYDA e-KTP agar terciptanya pelayanan public yang dapat

memuaskan masyarakat. Sedangkan alat pendukung pengoptimalan tujuan tersebut adalah kecanggihan teknologi berupa basis daring dalam Silayda KTP. Sesuai dengan tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan Misi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padangsidempuan yang mana kebijakan Terwujudnya Suatu keadaan yang diharapkan pada masa depan, Pelayanan Pemberian sesuatu kepada konsumen yang merasa memerlukan, Administrasi yang melaksanakan penata usaha Prima Yang sempurna yang intinya memberikan pelayanan yang optimal sesuai dengan harapan masyarakat.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan Silayda

Kantor Disduk capil Kota Padangsidimpuan berinovasi untuk melayani masyarakat agar pelayanan semakin efektif, salah satunya dengan menerapkan pelayan *online* kepada masyarakat yang ingin mengurus KTP elektronik yang diterapkan sejak 8 juni 2020. Disduk capil Kota Padangsidimpuan saat ini telah melayani pendaftaran secara *online* sebanyak 3000 orang, dan telah melayani 1700 pendaftar.

2. Kendala dalam pelaksanaan SILAYDA (Sistem Layanan Daring) E-KTP di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padangsidimpuan yaitu:

1) Jaringan/server. Jaringan Nirkabel adalah bidang disiplin yang berkaitan dengan komunikasi antar sistem komputer tanpa menggunakan kabel. Jaringan nirkabel ini sering dipakai untuk jaringan komputer

baik pada jarak yang dekat maupun jarak jauh.

2) Kurangnya maksimal sosialisasi Disduk capil kepada masyarakat Terdapat masyarakat yang kurang memahami pentingnya legalitas penduduk sehingga masih ada masyarakat yang belum melakukan permohonan identitas kependudukan seperti pembuatan e-KTP yang membuat Disduk capil harus menyisir agar masyarakat memiliki kesadaran untuk datang melakukan permohonan e-KTP.

Referensi

a. Sumber Buku

Richard, M. 1985. *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga.

b. Sumber Jurnal

Sainul, Ahmad. *Konsep Hak Milik Dalam Islam*. Jurnal Al Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarahan Dan Keperdataan 6, no. 2 (2020): 198.

Gunawan, Hendra. *Eksistensi Hukum Islam Di Indonesian Dalam Pembangunan Nasional*. Yurisprundetia: Jurnal Hukum Ekonomi 4, no. 1 (2018): 108.

Gunawan, Syafri. *Historis Kajian Hak Azasi Manusia Di Dalam Hukum Islam*. Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Pranata Sosial 6, no. 2 (2020): 175.

Hasibuan, Umi Kalsum. *Keadilan Dalam Al-Qur'an (Interpretasi Ma'na Cum Maghza Terhadap Q.S Al-Qur'an Al-Hujurat 49: 9)*. Al-Fawatih: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Hadis 1, no. 2 (2020): 3.

Nasution, Adanan Murroh. *Batas Mengambil Keuntungan Menurut Hukum Islam*. Jurnal El-Qanuniy : Jurnal Ilmu Kesyarahan Dan Pranata Sosial 4, no. 1 (2018): 88.

Siregar, Sawaluddin. *Perpektif Hukum Islam Mengenai Mekanisme Manipulasi Pasar Dalam Transaksi Saham*

Dipasar Modal.
Yurisprundetia: Jurnal
Hukum Ekonomi 3, no. 2
(2017): 70.